



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

Painan, 3 November 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan



YUSWANTY, S.T., M.Si.

Pembina Tingkat I IV/b

NIP. 19770120 200312 2 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 ini merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan sebagaimana amanat dari Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat itu.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arahan kebijakan selama jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja instansi/organisasi berdasarkan pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini Kami Ucapkan Terima Kasih dan Penghargaan atas kerja keras saudara dengan harapan kinerja kita ini dapat memberikan Manfaat bagi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. LANDASAN HUKUM	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.3.1. Maksud.....	Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025	10
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	14
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN	28
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	30
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	Error! Bookmark not defined.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	51
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	51
3.2.1. Tujuan.....	51
3.2.2. Sasaran	52
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	54
BAB V PENUTUP	55
5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA	55
5.2. KAIDAH KAIDAH PELAKSANAAN.....	56
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu,

partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaksud dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan Wajib / Pilihan urusan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing masing Perangkat Daerah.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana yang menunjukkan prakiraan maju tahun n dan $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKASKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat

Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati pesisir Selatan No 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Dalam mengevaluasi capaian target dan mengukur pencapaian kinerja dengan merujuk pada perolehan data Perangkat Daerah sebelumnya. Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran operasional tahun ke 2 (Kedua) untuk periode Renstra 2025-2029. Disamping itu, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus Pembangunan Daerah tahun 2026, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun anggaran 2026, serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 juga mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian ATR, serta Rencana Kerja Dinas BMCKTR DAN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantara Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 -2026;
21. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Kerja ini adalah untuk membangun sebuah rencana kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (chek and balance) kewenangan atas kegiatan-

kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan adanya rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

1. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
2. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
3. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen Organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
4. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan anggaran Tahun 2026; dan

7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

Rencana Kerja ini juga dijadikan bahan acuan untuk:

1. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan OPD
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (AKIP)

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Ranwal Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan Penyusunan Ranwal Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-Kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk:

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Rencana Kerja dibandingkan dengan capaian target kinerja renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026
- b) Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Program/ Kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya pemerintah yang optimal dan tersedianya sarana dan prasarana pekerjaan umum, dengan pencapaian output pada tahun 202 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pengelolaan sumber daya air (sda)

3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
6. Program penataan bangunan gedung
7. Program penataan bangunan dan lingkungannya
8. Program penyelenggaraan jalan
9. Program pengembangan jasa konstruksi
10. Program penyelenggaraan penataan ruang

Rencana Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Pada Tahun 2025 total anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 52.995.418.384,- dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan program antara lain :

- a. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp.337.000.000 dimana realisasi hingga akhir Triwulan II telah realisasi keuangan sebesar Rp.31.906.550,- atau 9,47% dengan capaian kinerja RPJMD 91,17%
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdapat 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 1.081.624.000 dimana realisasi keuangan hingga akhir Triwulan II Rp. 2.472.283.616 ATAU 33,09% dengan capaian kinerja RPJMD 98,77 %
- c. Program pengelolaan sumber daya air (sda)/kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 3.100.000.000 dimana realisasi hingga akhir Triwulan II Rp. 946.691.718 atau 30,54 % dengan capaian kinerja RPJMD 80,67%)

- d. Program penyelenggaraan jalan terdapat 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 19.299.911.200 dimana realisasi hingga akhir triwulan II Rp. 6.794.317.358 atau 35,20 % dengan capaian kinerja RPJMD 99,94%
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 6 Kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 13.308.473.708 dimana realisasi hingga akhir triwulan II Rp. 9.652.964.027 atau 72,53%. Capaian kinerja pada program ini adalah Nilai kematangan inovasi dengan capaian kinerja 92%
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi terdapat 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 184.999.972 dimana realisasi hingga akhir triwulan II Rp. 46.946.666 atau 25,13% dengan capaian kinerja RPJMD 35,41%
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdapat 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 1.499.988.504 dimana realisasi hingga akhir triwulan II Rp. 277.369.601 atau 18,49% dengan capaian kinerja RPJMD 89,73%
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdapat 1 kegiatan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 1.784.000.00 dimana realisasi hingga akhir triwulan II Rp. 318.326.205 atau 17,84%.
- i. Program Penataan Bangunan Gedung terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp.1.530.140.000 dimana realiasi hingga akhir triwulan II Rp. 750.928.542 atau 49,08%
- j. Program Penataan Bagunan dan Lingkungannya terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp.1.994.660.000 dimana realisasi hingga akhir triwulan II Rp. 905.284.054 atau 45,38%

Faktor faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.

2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang selaras dengan pencapaian target masing masing kegiatan.

Evaluasi Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan
(Terlampir)**

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I		01	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		74.16	1,070,818,529,302	22.23	333,032,251,171	58.41	140,964,511,749	51.61	112,903,171,002	70.03	112,903,171,002	100.04	31.43	
I		01	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100.00	86,537,289,648	32.42	22,232,627,666	80.00	23,135,326,018	17.82	13,730,698,840	50.25	35,963,326,506	50.25	41.56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		01	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100.00	944,413,464	40.00	231,993,581	20.00	100,000,000	20.00	233,442,450	60.00	465,436,031	60.00	49.28	
		01	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	50.00	552,513,760	20.00	149,419,721	10.00	50,000,000	10.00	127,018,720	30.00	276,438,441	60.00	50.03	
		01	03	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	50.00	391,899,704	20.00	82,573,860	10.00	50,000,000	10.00	106,423,730	30.00	188,997,590	60.00	48.23	
		01	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100.00	74,740,805,678	37.92	18,908,114,837	19.88	21,616,376,018	19.88	10,129,025,754	57.80	29,037,140,591	57.80	38.85	
		01	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8,050.00	71,420,806,970	3,050.00	18,196,566,801	1,600.00	21,466,376,018	1,600.00	9,875,219,934	4,650.00	28,071,786,735	57.76	39.30	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	60.00	3,253,429,438	24.00	638,466,354	12.00	100,000,000	12.00	197,726,070	36.00	836,192,424	60.00	25.70	
		01	03	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60.00	66,569,270	24.00	73,081,682	12.00	50,000,000	12.00	56,079,750	36.00	129,161,432	60.00	194.0 3	
		01	03	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100.0 0	263,246,900	28.57	22,520,200	34.29	10,000,000	34.29	65,004,500	62.86	87,524,700	62.86	33.25	
		01	03	01	2.03	01		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	15.00	113,246,900	6.00	22,520,200	0.00	5,000,000	0.00	0	6.00	22,520,200	40.00	19.89	
		01	03	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.00	150,000,000	4.00		12.00	5,000,000	12.00	65,004,500	16.00	65,004,500	80.00	43.34	
		01	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.0 0	1,947,625,528	43.52	761,005,193	21.28	355,000,000	18.16	627,992,150	61.68	1,388,997,343	61.68	71.32	
		01	03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	15.00	50,759,210	6.00	59,967,570	4.00	50,000,000	4.00	39,994,000	10.00	99,961,570	66.67	196.9 3	
		01	03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18.00	49,391,040	8.00	245,635,500	4.00	50,000,000	2.00	190,575,000	10.00	436,210,500	55.56	883.1 8	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	20.00	262,677,098	4.00	100,750,300	4.00	50,000,000	3.00	63,195,700	7.00	163,946,000	35.00	62.41	
		01	03	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	40.00	100,516,680	25.00	38,001,940	12.00	50,000,000	12.00	27,199,750	37.00	65,201,690	92.50	64.87	
		01	03	01	2.06	08			Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	15.00	49,822,500	4.00	12,002,650	4.00	50,000,000	2.00	5,821,200	6.00	17,823,850	40.00	35.77	
		01	03	01	2.06	09			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	60.00	1,409,459,000	24.00	304,647,233	12.00	100,000,000	12.00	301,206,500	36.00	605,853,733	60.00	42.98	
		01	03	01	2.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	20.00	25,000,000	0.00		0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	01	2.07				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100.00	31,162,000	4.00	31,162,000	0.00	10,000,000	0.00	0	4.00	31,162,000	4.00	100.00	
		01	03	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10.00	31,162,000	4.00	31,162,000	0.00	10,000,000	0.00	0	4.00	31,162,000	40.00	100.00	
		01	03	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	4,541,847,538	39.39	1,245,756,049	21.21	170,000,000	25.00	2,219,314,018	64.39	3,465,070,067	64.39	76.29	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	60.00	2,209,735,248	24.00	502,896,006	12.00	100,000,000	12.00	226,915,272	36.00	729,811,278	60.00	33.03	
		01	03	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	107,000,000	4.00	20,114,734	4.00	20,000,000	9.00	8,995,000	13.00	29,109,734	108.33	27.21	
		01	03	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60.00	2,225,112,290	24.00	722,745,309	12.00	50,000,000	12.00	1,983,403,746	36.00	2,706,149,055	60.00	121.62	
		01	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100.00	4,068,188,540	33.57	1,032,075,806	10.60	883,950,000	7.42	455,919,968	40.99	1,487,995,774	40.99	36.58	
		01	03	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya (unit)	200.00	424,529,920	55.00	46,349,011	15.00	35,000,000	12.00	38,912,168	67.00	85,261,179	33.50	20.08	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	300.00	1,571,871,790	125.00	297,587,393	20.00	613,950,000	12.00	179,861,800	137.00	477,449,193	45.67	30.37	
		01	03	01	2.09	03			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (unit)	30.00	807,950,000	6.00	141,715,198	5.00	125,000,000	0.00	0	6.00	141,715,198	20.00	17.54	
		01	03	01	2.09	04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (unit)	16.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	01	2.09	05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	5.00	25,000,000			0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	01	2.09	06			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	5.00	112,460,000	2.00	28,951,604	8.00	50,000,000	6.00	17,900,000	8.00	46,851,604	160.00	41.66	
		01	03	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	10.00	1,101,376,830	2.00	517,472,600	12.00	50,000,000	9.00	219,246,000	11.00	736,718,600	110.00	66.89	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
II		01	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	100.0 0	50,946,254,01 0	29.77	13,687,603,90 0	98.58	5,178,436,094	89.99	3,393,053,295	119.7 6	17,080,657,195	119.76	33.53	
		01	03	03	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	100.0 0	50,946,254,01 0	29.77	13,687,603,90 0	98.58	5,178,436,094	89.99	3,393,053,295	119.7 6	17,080,657,195	119.76	33.53	
	Sasaran 2.2.2 Meningkatn ya kemampua n ekonomi masyarakat miskin/Ren tan Miskin	01	03	03	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (dok)	150.0 0	2,198,968,390	44.00	872.664,642	20.00	40,000,000	17.00	614,600,446	61.00	1,487,265,088	40.67	67.63	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggun g Jawa b	
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		01	03	03	2.01	02			Supervisi Pembangunan/P eningkatan/Perlu asan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Opti malisasi SPAM (dokumen)	5.00	200,000,000	0.00	0	0.00	40,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	03	2.01	03			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun (liter/detik)	5.00	200,000,000	0.00	0	0.00	40,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	03	2.01	04			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (SR)	900.0 0	16,421,106,50 0	200.0 0	858,737,958	0.00	40,000,000	0.00	0	200.0 0	858,737,958	22.22	5.23		
		01	03	03	2.01	05			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pekotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (liter/detik)	5.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	03	2.01	06			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		120.0 0	8,425,186,800	50.00	4,037,846,780	0.00	1,474,000,000	0.00	0	50.00	4,037,846,780	41.67	47.93		
		01	03	03	2.01	11			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggar akan SPAM yang Terbina dan Terawasi	14.00	139,985,770	8.00	27,997,154	0.00	0	0.00	0	8.00	27,997,154	57.14	20.00		

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	03	2.01	16			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan (unit)	18.00	140,543,890	8.00	322,549,356	0.00	0	0.00	0	8.00	322,549,356	44.44	229.50	
		01	03	03	2.01	19			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (rumah tangga)	825.00	14,905,462,660	320.00	7,567,808,010	0.00	0	0.00	0	320.00	7,567,808,010	38.79	50.77	
				1.03.03.2.0 1.26					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	14.00	2,450,000,000	0.00	0	6.00	1,050,000,000	3.20	869,312,422	3.20	869,312,422	22.86	35.48	
				1.03.03.2.0 1.28					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	40.00	5,200,000,000	0.00	0	20.00	1,100,000,000	8.70	1,688,419,927	8.70	1,688,419,927	21.75	32.47	
				1.03.03.2.0 1.29					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	20.00	620,000,000	0.00	0	4.00	535,000,000	4.00	214,090,500	4.00	214,090,500	20.00	34.53	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				1.03.03.2.0 1.32				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.200. 00	20,000,000	0.00	0	0.00	854,436,094	0.00	6,630,000	0.00	6,630,000	0.00	33.15	
V		01	03	04				PROGRAM PENGEMBANG AN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah diperkotaan	100.0 0	9,132,100,549	0.01	1,279,871,670	0.00	8,000,000	0.00	0	0.01	1,279,871,670	0.01	14.02	
		01	03	04	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pengurangan sampah diperkotaan	100.0 0	9,132,100,549	0.01	1,279,871,670	0.00	8,000,000	0.00	0	0.01	1,279,871,670	0.01	14.02	
Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin/Rentan Miskin																						
		01	03	07	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Disusun (dokumen)	2.00	5,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3								4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	07	2.01	02			Supervisi Pembangunan/R ehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/P eningkatan TPA/TPST/SP A Kewenangan Provinsi (dokumen)	2.00	5,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	07	2.01	03			Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SP A/TPS- 3R/TPS (Rumah Tangga)	2.00	5,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	07	2.01	04			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SP A/TPS- 3R/TPS yang Direhabilitasi (unit)	3.00	5,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	07	2.01	05			Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SP A/TPS- 3R/TPS (Rumah Tangga)	60,00 0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	07	2.01	06			Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan (unit)	20.00	9,097,100,549	8.00	1,279,871,670	0.00	1,000,000	0.00	0	8.00	1,279,871,670	40.00	14.07		

		01	03	07	2.01	07			Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan (orang)	240.00	5,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	07	2.01	08			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS (Kelompok)	50.00	5,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
II	I	01	03	05					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100.00	30,997,728,770	29.35	10,750,825,055	78.36	2,515,000,000	77.40	1,872,623,313	106.75	12,623,448,368	106.75	40.72	
		01	03	05	2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100.00	30,997,728,770	29.35	10,750,825,055	78.36	2,515,000,000	77.40	1,872,623,313	106.75	12,623,448,368	106.75	40.72	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Sasaran 2.2.2 Meningkat nya kemampua n ekonomi masyaraka t miskin/Ren tan Miskin	01	03	05	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kot a yang Disusun (dokumen)	25.00	1,500,000,000	0.00	0	3.00	48,000,000	3.00	993,376,705	3.00	993,376,705	12.00	66.23	
		01	03	05	2.01	02		Supervisi Pembangunan/R ehabilitasi/ Peningkatan/Perl uasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/P eningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (dokumen)	14.00	240,000,000	0.00	0	0.00	48,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	05	2.01	04		Rehabilitasi/Peni ngkatan/Perluasa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yangterlayani melalui optimalisasi SPALD-T SkalaKota (rumah tangga)	500.0 0	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	05	2.01	05		Rehabilitasi/Peni ngkatan/Per luasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yangterlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukima (rumah tangga)	300.0 0	1,610,000,000	0.00	0	0.00	322,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	05	2.01	06			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (rumah tangga)	1,205. 00	4,900,000,000	625.0 0	6,062,701,337	250.00	1,000,000,000	57.00	603,814,500	682.00	6,666,515,837	56.60	136.05	
		01	03	05	2.01	10			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara (unit)	45.00	909,775,348	18.00	486,991,785	12.00	500,000,000	12.00	104,700,972	30.00	591,692,757	66.67	65.04	
		01	03	05	2.01	12			Pembangunan/P enyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Rumah Tanga)	65.00	6,443,830,648	8.00	1,294,378,374	0.00	400,000,000	0.00	0	8.00	1,294,378,374	12.31	20.09	
		01	03	05	2.01	13			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja (unit)	2.00	240,000,000	0.00	0	0.00	48,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	05	2.01	14			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	500.0 0	1,167,428,448	130.0 0	297,324,041	100.00	48,000,000	15.00	170,731,120	145.00	468,055,161	29.00	40.09	
		01	03	05	2.01	15			Pembangunan/P enyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun (M³/Hari)	24.00	13,721,694,32 6	8.00	2,609,429,518	0.00	48,000,000	12.00	16	20.00	2,609,429,534	83.33	19.02	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b	
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		01	03	05	2.01	17			Supervisi Pembangunan/R ehabilitasi/ Peningkatan/Perl uasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT (dokumen)	8.00	240,000,000	0.00		0.00	48,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
I V		01	03	06					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	20.76	15,123,891,85 1	14.00	5,198,772,668	14.22	4,614,000,000	12.98	2,910,984,239	26.98	8,109,756,907	129.96	53.62		
1		01	03	06	2.01				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.0 0	15,123,891,85 1	2,227. 14	5,198,772,668	3,074.59	4,614,000,000	2,357. 08	2,910,984,239	4,584. 22	8,109,756,907	4,584. 22	53.62		
	Sasaran 3.1.4 : Terpenuhi nya kebutuhan infrastrukt ur penunjang ekonomi unggulan	01	03	06	2.01	01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun (dok)	40.00	624,999,900	16.00	333,674,590	0.00	5,000,000	0.00	0	16.00	333,674,590	40.00	53.39		
		01	03	06	2.01	05			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (m)	4,500. 00	5,769,999,581	1,990. 00	3,825,455,593	250.00	260,000,000	447.75	477,562,750	2,437. 75	4,303,018,343	54.17	74.58		
		01	03	06	2.01	06			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (m)	430.0 0	649,999,805	412.0 0	612,429,030	0.00	5,000,000	0.00	0	412.00	612,429,030	95.81	94.22		

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	06	2.01	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (m)	510.0 0	703,892,565	186.0 0	427,213,455	100.00	3,909,000,000	0.00	0	186.00	427,213,455	36.47	60.69	
		01	03	06	2.01	10		Supervisi Pembangunan/P eningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan (dokumen)	5.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	06	2.01	12		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (m)	600.0 0	4,500,000,000	0.00	0	350.00	390,000,000	2,121. 60	1,856,487,750	2,121. 60	1,856,487,750	353.60	41.26	
		01	03	06	2.01	13		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (m)	5.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	06	2.01	14		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi (m)	5.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	06	2.01	28		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10.00	1,800,000,000	0.00	0	4.00	15,000,000	318.00	267,690,999	318.00	267,690,999	3,180. 00	14.87	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggun g Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	06	2.01	31			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0.00	1,000,000,000	120.00 0.00	0	187,000. 00	15,000,000	186,00 0.00	309,242,740	306,00 0.00	309,242,740	#DIV/0 !	30.92	
V I		01	03	08					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	100.00	18,225,786,02 5	25.10	5,425,031,219	88.96	1,855,000,000	87.77	2,349,678,203	112.87	7,774,709,422	112.87	42.66	
		01	03	08	2.01				Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik yang Representatif	100.00	18,225,786,02 5	90.00	5,425,031,219	88.96	1,855,000,000	100.00	2,349,678,203	190.00	7,774,709,422	190.00	42.66	
	Sasaran 3.1.4 : Terpenuhi nya kebutuhan infrastrukt ur penunjang ekonomi unggulan	01	03	08	2.01	02			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan , Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot a (dok)	18.00	11,189,576,47 7	4.00	2,948,955,125	0.00	10,000,000	0.00	0	4.00	2,948,955,125	22.22	26.35	
		01	03	08	2.01	03			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kot a yang Disusun (dok)	30.00	226,602,204	6.00	18,303,638	0.00	5,000,000	0.00	0	6.00	18,303,638	20.00	8.08	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (%)		SKPD Penan ggun g Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	08	2.01	04		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kot a (dok)	2.00	25,000,000	1.00	7,934,150	0.00	5,000,000	0.00	0	1.00	7,934,150	50.00	31.74	
		01	03	08	2.01	18		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot a yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	20.00	2,500,000,000	0.00	0	8.00	200,000,000	5.00	992,273,000	5.00	992,273,000	25.00	39.69	
		01	03	08	2.01	05		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggar aan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kot a (dok)	25.00	151,891,934	4.00	7,934,150	0.00	5,000,000	0.00	0	4.00	7,934,150	16.00	5.22	
		01	03	08	2.01	10		Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) (unit)	10.00	20,000,068	3.00	6,887,068	0.00	5,000,000	0.00	0	3.00	6,887,068	30.00	34.44	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	08	2.01	13			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan (unit)	14.00	799,999,850	4.00	1,967,335,318	6.00	1,175,000,000	0.00	0	4.00	1,967,335,318	28.57	245.92	
		01	03	08	2.01	23			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	255.00	312,715,492	64.00	467,681,770	10.00	150,000,000	63.00	378,894,603	127.00	846,576,373	49.80	270.72	
		01	03	08	2.01	21			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28.00	3,000,000,000	0.00	0	4.00	300,000,000	1.00	978,510,600	1.00	978,510,600	3.57	32.62	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Pena nggu ng Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
V II		01	'03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANN YA	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkunganny a terhadap dokumen RTBL	66.70	22,684,634,65 2	23.00	4,055,914,324	62.60	515,000,000	61.20	1,208,219,000	84.20	5,264,133,324	126.2 4	23.21	
		01	03	09	2.01			Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik yang Representatif	119.00	22,684,634,65 2	23.00	4,055,914,324	62.60	515,000,000	15.65	1,208,219,000	38.65	5,264,133,324	32.48	23.21	
	Sasaran 3.1.4 : Terpenuhi nya kebutuhan infrastrukt ur penunjang ekonomi unggulan	01	03	09	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kot a (dok)	15.00	279,999,960	4.00	78,424,960	4.00	5,000,000	0.00	0	4.00	78,424,960	26.67	28.01	
		01	03	09	2.01	03		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (kawasan)	34.00	14,262,332,35 3	10.00	3,621,294,664	0.00	5,000,000	0.00	0	10.00	3,621,294,664	29.41	25.39	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKP D Pena nggu ng Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	09	2.01	04		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (kawasan)	30.00	2,592,302,339	9.00	356,194,700	0.00	5,000,000	0.00	0	9.00	356,194,700	30.00	13.74	
		01	03	09	2.01	07		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	15.00	900,000,000	0.00	0	2.00	100,000,000	0.00	16,433,500	0.00	16,433,500	0.00	1.83	
		01	03	09	2.01	08		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	10.00	150,000,000	0.00	0	2.00	300,000,000	0.00	1,880,500	0.00	1,880,500	0.00	1.25	
		01	03	09	2.01	10		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	15.00	4,500,000,000	0.00	0	4.00	100,000,000	3.00	1,189,905,000	3.00	1,189,905,000	20.00	26.44	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKP D Pena nggu ng Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
V II I		01	'03	10				PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	44.86	740,944,513,3 98	26.69	255,836,414,18 5	43.36	93,165,749,63 7	44.77	72,632,784,549	71.46	369,750,633	159.3 0	0.00	
							Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		48.67	12.82		46.44		42.89		55.71		114.4 6				
		01	03	10	2.01			Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap dan Jembatan Kondisi Baik	100.0 0	740,944,513,3 98	32.36	255,836,414,18 5	18.09	93,165,749,63 7	13.57	72,632,784,549	45.93	328,469,198,734	45.93	44.33	
	Sasaran 3.1.4 : Terpenuhi ya kebutuhan infrastrukt ur penunjang ekonomi unggulan	01	03	10	2.01	24		Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun (km)	300.0 0	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	10	2.01	16		Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti konstruksinya (m)	1,100 .00	46,949,088,56 5	70.00	977,778,252	0.00	0	0.00	0	70.00	977,778,252	6.36	2.08	
		01	03	10	2.01	29		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembanga n Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara an Jalan dan Jembatan yang Disusun	420.0 0	6,499,349,446	195.00	3,563,417,852	20.00	860,749,637	11.00	453,543,000	206.0 0	4,016,960,852	49.05	61.81	
		01	03	10	2.01	32		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)	40.00	65,725,691,43 1	12.96	7,395,510,550	6.00	12,200,000,00 0	0.17	173,182,800	13.13	7,568,693,350	32.83	11.52	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKP D Pena nggu ng Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	10	2.01	33			Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	50.50	176,739,459,203	12.40	57,612,561,500	8.00	16,600,000,000	0.54	310,940,000	12.94	57,923,501,500	25.62	32.77	
		01	03	10	2.01	34			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	80.00	207,130,649,411	50.00	66,953,285,574	0.00	3,000,000,000	0.00	0	50.00	66,953,285,574	62.50	32.32	
		01	03	10	2.01	38			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (m)	2,000.00	3,721,632,393	820.00	2,011,779,250	600.00	3,000,000,000	581.00	1,435,819,866	1,401.00	3,447,599,116	70.05	92.64	
		01	03	10	2.01	39			Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhab (m)	1,650.00	59,917,982,611	343.00	4,489,038,848	255.00	1,500,000,000	0.37	3,174,059,664	343.37	7,663,098,512	20.81	12.79	
		01	03	10	2.01	40			Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (m)	30.00	4,351,414,823	25.00	8,403,786,553	2.00	2,600,000,000	0.13	7,560,250,893	25.13	15,964,037,446	83.78	366.87	
		01	03	10	2.01	44			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (km)	87.00	164,250,345,000	62.98	101,390,170,675	24.00	50,400,000,000	23.66	56,931,038,664	86.64	158,321,209,339	99.59	96.39	
		01	03	10	2.01				Penanggulangan Bencana/Tangga p Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/T erekonstruksi Akibat Bencana (km)	12.00	1,009,900,583	4.00	129,042,000	0.00	0	0.00	0	4.00	129,042,000	33.33	12.78	
		01	03	10	2.01	46			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	890.00	4,623,999,933	560.00	2,910,043,131	290.00	3,000,000,000	287.40	2,593,949,662	847.40	5,503,992,793	95.21	119.03	
I X		01	03	11					PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tekni si/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	91.32	3,626,864,382	2.80	592,771,183	68.49	540,000,000	24.25	206,000,720	27.05	798,771,903	29.62	22.02	
		01	03	11	2.01				Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	140.00	1,420,914,180	56.00	258,363,057	25.00	265,000,000	32.00	82,568,568	88.00	340,931,625	62.86	23.99	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggun g Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Sasaran 3.1.4 : Terpenuhiya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi unggulan	01	03	11	2.01			Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	10.00	207,523,820	2.00	24,204,482	5.00	55,000,000	0.00	0	2.00	24,204,482	20.00	11.66	
		01	03	11	2.01	07		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (orang)	50.00	275,000,000	25.00	67,009,850	5.00	55,000,000	0.00	0	25.00	67,009,850	50.00	24.37	
		01	03	11	2.01	09		Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	5.00	31,144,080	2.00	5,826,650	1.00	55,000,000	0.00	0	2.00	5,826,650	40.00	18.71	
		01	03	11	2.01	11		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga JasaKonstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	12.00	250,000,000	0.00	0	0.00	50,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	11	2.01	13		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (orang)	140.00	407,246,280	56.00	161,322,075	25.00	55,000,000	0.00	0	56.00	161,322,075	40.00	39.61	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	11	2.01	16			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	670.00	250,000,000	0.00	0	0.00	50,000,000	32.00	82,568,568	32.00	82,568,568	4.78	33.03	
		01	03	11	2.02				Penyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	100.00	1,069,084,410	21.34	255,070,465	1.20	125,000,000	0.24	123,432,152	21.58	378,502,617	21.58	35.40	
		01	03	11	2.02	01			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggara an Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (laporan)	12.00	134,200,000	1.00	227,941,465	4.00	55,000,000	0.00	0	1.00	227,941,465	8.33	169.85	
		01	03	11	2.02	03			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggara an Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAK (orang)	0.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	#DIV/ 0!	0.00	
		01	03	11	2.02	06			Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (dok)	10.00	259,884,410	2.00	27,129,000	0.00	5,000,000	0.00	0	2.00	27,129,000	20.00	10.44	
		01	03	11	2.02	08			Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi (dok)	5.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggun g Jawa b
1	2	3								4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	11	2.02	09			Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (dok)	5.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	11	2.02	15			Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	10.00	600,000,000	0.00	0	1.00	50,000,000	1.00	123,432,152	1.00	123,432,152	10.00	20.57		
		01	03	11	2.04				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaran Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100.00	1,136,865,792	43.00	79,337,661	0.00	150,000,000	0.00	0	43.00	79,337,661	43.00	6.98		
		01	03	11	2.04	01			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaran, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (dok)	5.00	95,812,370	1.00	19,987,050	0.00	0	0.00	0	1.00	19,987,050	20.00	20.86		
		01	03	11	2.04	02			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaran, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (orang)	250.00	181,562,730	40.00	50,904,611	0.00	45,000,000	0.00	0	40.00	50,904,611	16.00	28.04		

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKP D Pena nggu ng Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	11	2.04	03			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (laporan)	10.00	359,490,692	2.00	8,446,000	0.00	5,000,000	0.00	0	2.00	8,446,000	20.00	2.35	
		01	03	11	2.04	06			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5.00	250,000,000	0.00	0	0.00	50,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	11	2.04	07			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kot a yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	5.00	250,000,000	0.00	0	0.00	50,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
X		01	03	12					PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukanny a	85.00	4,809,821,076	47.34	1,619,305,523	70.00	670,000,000	74.77	437,927,305	122.11	2,057,232,828	143.6 5	42.77	
		01	03	12	2.01				Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		100.0 0	3,291,340,436	29.63	929,212,307	0.00	625,000,000	0.00	0	29.63	929,212,307	29.63	28.23	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKP D Pena nggu ng Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Sasaran 3.1.4 : Terpenuhi nya kebutuhan infrastrukt ur penunjang ekonomi unggulan	01	03	12	2.01	02		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kot a (dok)	12.00	2,931,300,876	4.00	898,560,507	0.00	620,000,000	0.00	0	4.00	898,560,507	33.33	30.65	
		01	03	12	2.01	04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang (dok)	15.00	360,039,560	4.00	30,651,800	0.00	5,000,000	0.00	0	4.00	30,651,800	26.67	8.51	
		01	03	12	2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100.0 0	25,000,000	0.00	0		5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	12	2.03	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot a (dok)	1.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100.0 0	1,082,554,990	24.11	326,312,140	53.57	30,000,000	42.91	437,927,305	67.01	764,239,445	67.01	70.60	
		01	03	12	2.03	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12.00	907,554,990	4.00	326,312,140	0.00	0	0.00	0	4.00	326,312,140	33.33	35.96	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Ou tput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKP D Pena nggu ng Jawa b	
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		01	03	12	2.03	03			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggara an penataan ruang	12.00	75,000,000	0.00	0	0.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	12	2.03	04			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	200.0 0	100,000,000	50.00	0	120.00	15,000,000	99.00	437,927,305	149.00	437,927,305	74.50	437.93		
		01	03	12	2.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100.0 0	410,925,650	88.27	363,781,076	0.00	10,000,000	0.00	0	88.27	363,781,076	88.27	88.53		
		01	03	12	2.04	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (dok)	12.00	25,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		01	03	12	2.04	04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (dok)	150.0 0	385,925,650	143.0 0	363,781,076	49.00	5,000,000	0.00	0	143.00	363,781,076	95.33	94.26		

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggun g Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I		1.03.02							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	40.10	87,789,644,941	14.00	13,632,985,448	37.97	8,768,000,000	34.94	14,161,201,538	48.94	27,794,186,986	122.04	31.66	
										Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	66.70	187,161,251,938	20.63	25,178,840,605	62.60	87,135,617,500	50.48		71.11	25,178,840,605	106.61	13.45	
		1.0 3.0 2.2. 01.						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	40.10	87,789,644,941	14.00	13,632,985,448	37.97	8,768,000,000	34.94	4,947,299,666	48.94	18,580,285,114	122.04	21.16		
	Sasaran 3.1.4 : Terpenuhi ya kebutuhan infrastrukt r penunjang ekonomi unggulan	01	03	03	2.01	06		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (unit)	12.00	50,000,000	0.00	0	0.00	10,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		1.0 3.0 2.2. 01. 10						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (km)	50.00	2,670,000,000	0.00	0	0.00	534,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3							4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	03	2.01	21			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitas (unit)	12.00	50,000,000	0.00	0	0.00	10,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		1.03.02.2.01.46							Normalisasi/Rest orasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi (km)	12.00	5,200,000,000	0.00	0	0.00	1,040,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	03	2.01	53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (km)	25.00	11,395,000,00 0	0.00	0	0.00	2,279,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	03	2.01				Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	25.00	15,148,945,93 4	10.00	2,835,216,200	0.00	20,000,000	0.00	0	10.00	2,835,216,200	40.00	18.72	
		01	03	03	2.01	54			Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (km)	8.00	5,000,000,000	0.00	0	0.00	1,000,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		01	03	03	2.01	61			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kot a (orang)	2.00	100,000,000	0.00	0	0.00	20,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
		1.03.02.2.01.72							Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Disusun (dokumen)	15.00	31,906,420	8.00	112,258,350	0.00	5,000,000	0.00	0	8.00	112,258,350	53.33	351.8 4	

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b
1	2	3						4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1.03.02.2.01.93						Normalisasi/Rest orasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi (km)	85.00	20,761,789,15 7	25.50	3,977,115,978	10.00	1,400,000,000	11.00	999,818,750	36.50	4,976,934,728	42.94	23.97	
		'1.03.02.2.01.73						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan dipelihara (km)	20.00	4,560,000,000	0.00	0	5.00	1,000,000,000	9.00	1,298,719,056	9.00	1,298,719,056	45.00	28.48	
		1.03.02.2.01.109						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (km)	15.00	22,822,003,43 0	8.00	6,708,394,920	4.00	1,450,000,000	0.542	2,648,761,860	8.54	9,357,156,780	56.95	41.00	
		1.0	3.0	2.2	.01			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	66.70	187,161,251,9 38	20.63	25,178,840,60 5	62.60	87,135,617,500	50.48	9,213,901,872	71.11	34,392,742,477	106.6 1	18.38	
		1.03.02.2.02.08						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (km)	40.00	55,544,281,50 0	10.00	7,768,764,177	8.00	82,235,617,500	0.00	313,191,181	10.00	8,081,955,358	25.00	14.55	
		1.03.02.2.02.14						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (km)	24.00	115,284,603,2 89	7.46	13,341,917,50 6	8.00	3,400,000,000	3.43	6,699,159,830	10.89	20,041,077,336	45.38	17.38	
		1.03.02.2.02.21						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (km)	75.00	9,401,743,639	15.00	3,125,721,866	40.00	500,000,000	38.69	1,733,409,384	53.69	4,859,131,250	71.59	51.68	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan D aerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(O utput)	Target Kinerja RPJMD Kab./Kota Sampai pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kineja RPJMD Kab./Kota sampai pada Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai dengan Tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Tahun berjalan (2024) (%)		SKPD Penan ggung Jawa b	
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
		1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (bendung)	5.00	2,500,000,000	0.00	0	0.00	500,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00		
		1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi (unit)	10.00	2,030,806,530	8.00	406,161,306	0.00	0	0.00	0	8.00	406,161,306	80.00	20.00		
		1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (dok)	35.00	2,399,816,980	18.00	536,275,750	10.00	500,000,000	8.00	468,141,477	26.00	1,004,417,227	74.29	41.85		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																100.04	30.16	
PERINGKAT KINERJA																ST	SR	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Triwulan II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI AKHIR	TARGET AKHIR	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 1: Mempekuat Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan						
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	86,43	87	86,43	99,34%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi	Nilai kematangan Inovasi Perangkat Daerah	37,00	80,00	92,00	115,00%
MISI II: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat						
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten (%)	89,99	98,58	89,88	91,17%
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Menperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (%)	77,40	78,36	77,40	98,77%
MISI III: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah						
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	50,48	62,60	50,50	80,67%
		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	34,88	34,90	34,88	99,94%
		Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	2,59	68,49	24,25	35,41%
		Presentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (%)	97,96	83,33	74,77	89,73%
CAPAIAN KINERJA						88,76%

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang
 2. Pengelolaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Penetapan indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Beberapa Isu Strategis Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integrasi e-Government
2. Menyiapkan SDM yang unggul dalam menghadapi Globalisasi dan Revolusi Industri 5.0
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan adat
5. Penurunan angka kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.
6. Ketahanan pangan dengan cara irigasi yang lancar
7. Pencegahan kebencanaan banjir

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu penting yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa ruas jalan kabupaten, sehingga dapat mengganggu aktivitas dalam pemenuhan penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan.
2. Kondisi sarana pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna kelancaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Masih rendahnya cakupan layanan air minum
4. Sering terjadi banjir karena sistim drainase yang belum memadai
5. Fasilitas Sanitasi Masih belum merata terutama pada perdesaan/nagari dikarenakan kesulitan penentuan lahan dengan status yang jelas dan memenuhi kriteria untuk lokasi

pembangunan fasilitas MCK umum

6. Penegakan hukum tata ruang dan bangunan yang masih rendah, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target / amanat peraturan perundangan juga didukung dengan kurang pahamnya masyarakat akan aturan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.

2.4 TERHADAP REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaandan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.534.772.192,00		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Bulan Orang/bulan	10.294.772.192,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	195.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.535.000.000,00		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	350.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	5.650.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.050.000.000,00		
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Angka)	22266.44 44.19	17886.44 60.2	18000.44 39.80	18686.44 40.34	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai								
			<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				6 KM	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				4 KM	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
		-	-	-	-	-	-	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan</i>				1 KM	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Angka)	22266.44 44.19	17886.44 60.2	18000.44 39.80	18686.44 40.34	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai								
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan</i>				1 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi</i>				1 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai								
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>				1 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 UNIT	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	4.700.000.000,00		
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Kapasitas air baku	5.3	0	0	4.6	4.700.000.000,00	-	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.700.000.000,00		
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				1 Orang	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				100 SR	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	0,00		
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00		
	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan								
			<i>Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan</i>				0 Ton/hari	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
			<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	1.950.000.000,00		
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	16.5	6.7	8	10.3	1.950.000.000,00	-	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.950.000.000,00		
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>				2 M³/Hari	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja								
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>				120 Rumah Tangga	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAU)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	1.950.000.000,00	-	-
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja								
			<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	16.5	6.7	8	10.3	1.950.000.000,00	-	-
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>				1 Orang	50.000.000,00	-	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	2.100.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	13.63	13.25	13.25	13.31	2.100.000.000,00	-	-
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.100.000.000,00	-	-
	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis				1 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	13.63	13.25	13.25	13.31	2.100.000.000,00	-	-
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0				1 0	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan								
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				2 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	1.450.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	1.450.000.000,00		
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara								
			<i>Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)</i>				0 Bangunan Gedung Negara	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung 1	Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi	0.15	0	0.10	0.11	1.450.000.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan</i>				0 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>				0 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>				2 Bangunan Gedung	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	0.15	0	0.10	0.11	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota</i>				0 Bantuan Teknis	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL(UMUM (D.
		-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
			<i>Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya</i>				15 Orang	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL(UMUM (D.
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	0.15	0	0.10	0.11	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bang								
			<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>				110 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL(UMUM (D.
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	650.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	650.000.000,00	-	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00		
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya terhadap dokumen RTBL	70.60	61	64.60	66.60	650.000.000,00	-	-
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan</i>				3 Kawasan	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan								
			<i>Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan</i>				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	5.300.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	5.300.000.000,00	-	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	5.300.000.000,00		
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan								
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	47.9 50	42.89 44.86	43 44.86	43.89 45.86	5.300.000.000,00	-	-
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				120 KM	1.500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan</i>				0 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				0,4 KM	400.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				0,5 KM	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan								
			<i>Panjang Jembatan yang Direhabilitasi</i>				25 Meter	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				0,4 KM	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan								
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				10 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan								
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				35 Meter	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	350.000.000,00		
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1	1	1	1	350.000.000,00	-	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	150.000.000,00		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	100.000.000,00		
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>				70 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-	-
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				1 Badan Usaha	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-			-	2.900.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	2.300.000.000,00		
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang								
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang								
			<i>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</i>				1 Publikasi	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota								
			<i>dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota								
			0				2 0	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	600.000.000,00		
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar								
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>				1 Peta	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang								
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota								
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALUMUM (D
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang								
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				0 Kegiatan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALUMUM (D
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00		
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang								
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALUMUM (D
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				0 Layanan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang								
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				0 Sistem Informasi	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00		
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang								
			<i>Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang</i>				0 Kasus	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang								
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				0 Kasus	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN
	1.03.12.2.04.0007	Pengkenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR								
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				0 Kasus	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK								
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan								
			<i>Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat								
			<i>Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR								
			<i>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang								
			<i>Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang</i>				0 Berita Acara	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGR AM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN N TARGET RENJAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RE NC AN A TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang BerkeadilanDan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0 Berita Acara	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang BerkeadilanDan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							39.970.071.338,00							39.871.272.192,00	

2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjangkaran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan lain yang diambil. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakandalam peningkatan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar dan pengembangan wilayah dan mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi tugas, secara umum tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada Rencana Kerja Tahun 2026, adalah:

- 1. Asta Cita 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Program Kerja:

- a. Memperkuat ketahanan dan kemandirian sumber daya air melalui pengelolaan infrastruktur air yang berkelanjutan
 - Pembangunan dan rehabilitasi jaringan air minum, irigasi, dan bendung
 - Pengendalian banjir, penguatan tanggul, dan normalisasi saluran
 - Perlindungan kawasan resapan air dalam tata ruang
 - Pemanfaatan teknologi monitoring debit dan kualitas air
- b. Memperkuat tata kelola ruang berbasis mitigasi bencana untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan wilayah
 - Penyelarasan RTRW/RDTR dengan peta risiko bencana (banjir, longsor, tsunami)
 - Penetapan dan perlindungan kawasan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai

- Pengendalian pemanfaatan ruang yang mengancam keselamatan dan kelestarian lingkungan
- c. Menindak tegas dan menertibkan pembangunan infrastruktur pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ketentuan tata ruang
- Pengawasan ketat terhadap pelanggaran bangunan di kawasan terlarang
 - Penertiban aktivitas pembangunan yang merusak ekosistem sungai, jalan negara dan ruang publik
 - Integrasi Pengawasan konstruksi dan tata ruang dengan penegakan hukum
- d. Menyediakan infrastruktur berbasis ekonomi hijau dan biru untuk mendukung kemandirian energi, pangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Penyediaan infrastruktur pendukung perikanan dan pesisir (akses jalan produksi)
 - Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata pesisir dan konservasi laut
 - Penerapan prinsip *green building* pada bangunan gedung pemerintah dan fasilitas publik
- e. Mengurangi emisi dan dampak lingkungan melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan efisiensi energi
- Optimalisasi drainase perkotaan untuk mencegah banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan
 - Pengurangan material konstruksi yang merusak lingkungan; peningkatan penggunaan material ramah lingkungan

- Peningkatan penghijauan di kawasan perkotaan (jalur hijau, taman kota)
 - Pengelolaan limbah konstruksi yang sesuai dengan standar teknis
- f. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan riset terhadap teknologi infrastruktur berkelanjutan
- Pelatihan tenaga teknis bersertifikat bidang jalan, jembatan, irigasi dan mitigasi bencana
 - Kerja sama penelitian/riset dengan perguruan tinggi mengenai desai tahan bencana, konservasi air dan inovasi infrastruktur hijau
 - Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data.

2. Asta Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrasturktur.

Program Kerja:

- a. Mempercepat pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, drainase, air minum, sanitasi) untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang/jasa, serta memicu aktivitas ekonomi lokal dan sektor produktif
- b. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur daerah, melalui pola padat karya, skema pelibatan masyarakat, serta peningkatan sertifikasi tenaga terampil agar tercipta lapangan kerja yang berkualitas.
- c. Mendukung ekosistem kewirausahaan dan industri kreatif melalui pembangunan dan peningkatan akses ke kawasan

pariwisata, sentra UMKM, pusat kerajinan, kawasan pesisir, serta ruang publik yang nyaman dan aman sebagai ruang ekonomi masyarakat.

- d. Mengembangkan inovasi dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan melalui digitalisasi perencanaan (BIM/GIS), material ramah lingkungan, desain berkelanjutan, dan pengendalian kualitas untuk menghasilkan infrastruktur yang efisien, tahan bencana, dan berumur panjang.
- e. Mendorong kemitraan investasi dan skema pembiayaan alternatif (kerja sama pemerintah dengan badan usaha – KPBU, CSR, dan lembaga donor) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis wilayah yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi lokal.
- f. Menyusun perencanaan tata ruang yang responsif ekonomi dan inklusif, memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan prioritas pembangunan daerah, mengendalikan kegiatan pembangunan agar selaras dengan potensi wilayah, serta menciptakan ruang-ruang produktif yang mendukung pemerataan pertumbuhan.

3. Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Prorgam Kerja: Pelatihan Pelatihan tenaga teknis bersertifikat

4. Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

- a. Memperluas pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar di desa seperti jalan desa, jembatan lingkungan, drainase, irigasi kecil, air minum, sanitasi, dan fasilitas umum

untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar tercukupi dan mendukung pengurangan kemiskinan.

- b. Melakukan percepatan perbaikan infrastruktur wilayah tertinggal dan pesisir melalui pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat—terutama di area rawan bencana, daerah sulit akses, dan permukiman padat—agar tercipta kesetaraan kualitas hidup antarwilayah.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lembaga (Dinas PMD, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, dan Bappeda) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, untuk memastikan sinergi program dan efektivitas pengentasan kemiskinan melalui infrastruktur yang tepat sasaran.

5. Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan budaya ,serta peningkatan toleranssi antar umat beragama

Program kerja: Rencana tata ruang daerah (RTRD), mitigasi bencana, konservasi alam, zonasi permukiman yang memperhatikan budaya lokal dan lingkungan.

Pokok pokok kebijakan Nasional yangh terkait dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan meliputi arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan pokok-pokok kebijakan sinergi nasional yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Memperkuat tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat
2. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan
3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan

infrastruktur air minum

4. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum yang sudah ada
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air melalui pembangunan sarana penunjang (embung, sumur dalam, reservoir)
6. Integrasi pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW/RDTR) untuk memastikan kesesuaian lokasi mendukung pusat pertumbuhan

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025- 2029 yang disusun dengan skala prioritas dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dan sasaran akan dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada misi pertama yaitu ***“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”*** dan ketiga yaitu ***“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”***, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

VISI: PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi I: Mewujudkan Pemerintah yang	1.1 Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil,	1.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sakip

Profesional dan Berintegritas	dan berkinerja tinggi	dan berdaya saing	
		1.1.3 Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi	Indeks Inovasi Daerah
Misi III: Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	3.1 Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintah yang Profesional dan Berintegritas

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Strategi 1 : Peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

: Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut yaitu:

***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***

Arah Kebijakan : 1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
3. Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Dinas PUTR

Strategi 2 : Meningkatkan Nilai Inovasi Daerah Melalui Penyusunan Pedoman Pengembangan Kapasitas Inovasi dan Pembentukan Hub-Hub Inovasi. (Hub- Hub adalah merupakan solusi yang berfungsi sebagai media kolaborasi antara Pelaku Inovasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Nagari, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Daerah).

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Arah Kebijakan :**
1. Pengembangan Kapasitas Individu. Peningkatan penerapan pengetahuan dan wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah dalam menunjang pelaksanaan kinerja organisasi. Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, mentoring, champion of Innovation, pembinaan, pendampingan serta coaching clinic yang mendukung tugas dan fungsi;
 2. Pengembangan Kapasitas Organisasi. Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efisien dan proporsional dalam menunjang pelaksanaan kinerja, Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap elemen dalam organisasi, Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan kerja, Peningkatan hubungan dan jaringan kerja dalam organisasi, Peningkatan budaya kerja organisasi yang inovatif serta menjunjung nilai-nilai ASN; dan Pengembangan Kapasitas Sistem.
 3. Pengembangan Kapasitas Sistem. Pemahaman dari kapasitas sistem adalah peningkatan kapasitas dengan menyiapkan kerangka kerja lingkungan strategis yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan

kepentingan stakeholders; Penyusunan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Peningkatan peran serta stakeholders dalam setiap penentuan arah kebijakan. Pengembangan Kapasitas Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan cara penyusunan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan partisipasi stakeholders; Perbaikan metode dan mekanisme penyusunan aturan dan kebijakan; Pembenahan mekanisme pelibatan partisipasi stakeholders dalam penyusunan setiap aturan dan kebijakan.

Misi III Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Sasaran 3 : Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi sektor unggulan

Strategi 3 :
1. Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA),
2. Meningkatkan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator ***Persenstase Indeks Kinerja Sistem Irigasi*** dan ***Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik***

Arah Kebijakan : 1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pemanfaatan sumber daya air

guna mendukung pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengairan berkelanjutan

2. Pemberdayaan masyarakat/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air melalui pembangunan sarana penunjang (embung, sumur dalam, reservoir)
4. Meningkatkan kualitas, pemeliharaan, dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah
5. Peningkatan kapasitas, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan
6. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, aman dan berkelanjutan

Sasaran 4 : Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar

Strategi 4 :
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap system penyediaan air minum
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator ***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik***

Arah Kebijakan 1. Peningkatan pembangunan dan pengembangan

jaringan infrastruktur air minum

2. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum yang sudah ada
3. Peningkatan kerjasama dengan BUMD/BUMN/swasta dalam pembangunan pengelolaan SPAM
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik
5. Pengembangan dan optimalisasi sistem pengelolaan air limbah melalui pembangunan jaringan perpipaan, instalasi pengolahan, serta pemeliharaan infrastruktur

Sasaran 5 : Meningkatkan pengendalian dan kualitas pembangunan infrastruktur

Strategi 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga konstruksi

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator ***Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi*** dan ***Rasio kepatuhan IMB Kab/ Kota***

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi
2. Memperkuat pengawasan, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3), serta peningkatan kepatuhan penyedia jasa untuk mewujudkan proyek konstruksi yang aman dan

berkualitas

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan tata ruang
4. Mengembangkan penyelenggaraan bangunan gedung yang berwawasan lingkungan , aman dan berkelanjutan

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Strategi 6 : Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penyusunan, peninjauan kembali, dan penyempurnaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan
2. Memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan, pengawasan dan penegakan hukum
3. Meningkatkan kualitas data, informasi dan sistem informasi geospasial tata ruang

**Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG REVELAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2025	TARGET 2026	KET
Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi untuk Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	I	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	76.61-88.30	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	79	83	
		Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	92	85	
		Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi sektor unggulan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	34,88	34,90	
			Persentase Indeks	50,48	50,75	

			Kinerja Sistem Irigasi			
		Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ko ta	89,88	89,98	
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan	77,40	78,44	

			air limbah domestik			
		Meningkatnya pengendalian dan kualitas pembangunan infrastruktur	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	24,25	10,58	
			Rasio Kepauhan IMB	100	100	
		Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Presentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	74,77	100	

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan hasil perumusan perencanaan berjenjang yang dimulai dari tingkat Nagari/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten melalui Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025. Namun dalam proses pelaksanaannya, sering muncul tambahan masukan dari para pemangku kepentingan untuk menampung aspirasi masyarakat yang belum tercakup dalam mekanisme perencanaan formal.

Penjaringan tambahan ini berlangsung melalui berbagai saluran, terutama melalui **kunjungan kerja** dan **reses anggota legislatif** yang berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan perangkat daerah. Pada lingkup Dinas PUTR, usulan yang disampaikan masyarakat umumnya berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar dan penataan ruang, antara lain:

- pembangunan/peningkatan jalan kabupaten,
- pembangunan/rehabilitasi jembatan,
- pembangunan dan peningkatan drainase,
- perbaikan fasilitas irigasi dan pengairan,
- penyediaan data dan dokumen tata ruang (RT/RW, RDTR, kawasan strategis).

Setiap agenda reses dan pertemuan pemangku kepentingan hampir selalu menghasilkan aspirasi baru dari masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PUTR, baik untuk tahun anggaran berikutnya maupun, apabila memungkinkan, pada tahun anggaran berjalan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seluruh usulan dari Musrenbang, aspirasi masyarakat melalui reses anggota legislatif, serta masukan dari pemangku kepentingan lainnya dikompilasi dan diverifikasi. Verifikasi dilakukan berdasarkan:

- kesesuaian dengan kewenangan Dinas PUPR,
- urgensi kebutuhan masyarakat,
- kondisi teknis di lapangan,
- ketersediaan anggaran,
- konsistensi dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra OPD),
- keselarasan dengan dokumen penataan ruang seperti RTRW, RDTR, dan kebijakan kawasan strategis.

Selanjutnya, usulan tersebut diklasifikasikan menurut jenis layanan, tingkat prioritas, wilayah sasaran, serta kemungkinan pelaksanaan berdasarkan kapasitas anggaran dan kesiapan teknis. Hasil telaah ini menjadi dasar bagi Dinas PUTR dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam Renja, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai arah kebijakan pemerintah daerah. Dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam renja perangkat daerah dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

A. Faktor- Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap rumusan Program dan Kegiatan Meliputi

Dalam proses pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilaksanakan, selain berbagai capaian positif, masih terdapat persoalan substansial yang perlu mendapatkan perhatian serius, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur dasar,

rendahnya aksesibilitas kawasan, menurunnya kualitas jaringan irigasi, serta belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan tersebut berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan pariwisata yang menjadi kekuatan utama daerah. Selaras dengan **Misi 3 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**, yaitu: **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”** maka perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Tahun 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang mendukung pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. **Dukungan Infrastruktur terhadap sentra pangan dan kawasan produktif:** Akses jalan ke kawasan pertanian, perikanan, dan sentra produksi pangan masih perlu diperbaiki untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi. Penguatan jaringan irigasi, embung, dan drainase juga sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
2. **Pengembangan infrastruktur menuju destinasi wisata unggulan**
Pesisir Selatan memiliki potensi wisata pantai, budaya, dan alam yang membutuhkan dukungan infrastruktur, seperti pelebaran jalan objek wisata, peningkatan kualitas jembatan menuju kawasan wisata, pembangunan trotoar, area parkir, serta infrastruktur penunjang kenyamanan dan keamanan pengunjung

B. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 9 (sembilan) Program, Kegiatan 19 (sembilan belas), Sub Kegiatan 41 (Empat Puluh satu). Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar. Lokasi program dan kegiatan yang tersebar dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penjelasan program/kegiatan dan pagu indikatif tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD apabila anggaran untuk mendanai program yang ada tidak mampu untuk memenuhi karena keterbatasan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai arahan dari Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan mengurangi jumlah anggaran pada masing masing program sesuai dengan plafonisasi. Program dan kegiatan yang tidak terakomodir di APBD Kabupaten Pesisir Selatan dapat diajukan anggaran ke APBD Propinsi dan APBN.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel. T.C.33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

3.3.2 Perumusan Kegiatan Prioritas

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai wujud implementasi peran tugas pokok dan tanggung jawab dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah otonom. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju ke arah yang lebih baik sesuai visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025- 2029.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Pesisir
Selatan (Terlampir)**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						39.970.071.3 38,00							39.871.272. 192,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.970.071.3 38,00							39.871.272. 192,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						39.970.071.3 38,00							39.871.272. 192,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	-	-			-	14.920.071.3 38,00						-	15.021.272. 192,00	
		[Meningkatkan Tata Kelola Organisasi]	Jumlah Inovasi	100	1	1	1	14.920.071.3 38,00	-	-	-	-	-	-	15.021.272. 192,00	-
			Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	2	100	100	100									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTST RAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yangdicapai	86	79.42	81	82									
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	103.799.146,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as	-	-	100.000.000 ,00	DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokume n	53.799.146,0 0	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujud ka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayana n Publik Yang Bersih, Akuntabe l Serta Berkualit as	-		50.000.000, 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.534.772.192,00		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Bulan Orang/bulan	10.294.772.192,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	195.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00		
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar								

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	350.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	5.650.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.050.000.000,00		
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Angka)	22266.44 44.19	17886.44 60.2	18000.44 39.80	18686.44 40.34	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai								
			<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				6 KM	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				4 KM	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan</i>				1 KM	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Angka)	22266.44 44.19	17886.44 60.2	18000.44 39.80	18686.44 40.34	5.650.000.000,00	-	-
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai								
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan</i>				1 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi</i>				1 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai								
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>				1 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 UNIT	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	4.700.000.000,00		
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Kapasitas air baku	5.3	0	0	4.6	4.700.000.000,00	-	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.700.000.000,00		
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				1 Orang	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				100 SR	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	0,00		
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00		
	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan								
			<i>Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan</i>				0 Ton/hari	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANAS)
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
			<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANAS)
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	1.950.000.000,00		
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	16.5	6.7	8	10.3	1.950.000.000,00	-	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.950.000.000,00		
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>				2 M³/Hari	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANAS)
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja								
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>				120 Rumah Tangga	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANAS)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	1.950.000.000,00	-	-
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja								
			<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	16.5	6.7	8	10.3	1.950.000.000,00	-	-
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>				1 Orang	50.000.000,00	-	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	2.100.000.000,00		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0				1 0	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan								
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				2 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	1.450.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	1.450.000.000,00		
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara								
			<i>Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)</i>				0 Bangunan Gedung Negara	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi	0.15	0	0.10	0.11	1.450.000.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan</i>				0 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>				0 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>				2 Bangunan Gedung	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	0.15	0	0.10	0.11	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota</i>				0 Bantuan Teknis	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALKUMUM (D
		-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				15 Orang	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALKUMUM (D
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	0.15	0	0.10	0.11	1.450.000.000,00	-	-
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bang								
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				110 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALKUMUM (D
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	650.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	650.000.000,00	-	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00		
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya terhadap dokumen RTBL	70.60	61	64.60	66.60	650.000.000,00	-	-
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan</i>				3 Kawasan	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan								
			<i>Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan</i>				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	5.300.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	5.300.000.000,00	-	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	5.300.000.000,00		
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan								
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALU)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	47.9 50	42.89 44.86	43 44.86	43.89 45.86	5.300.000.000,00	-	-
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				120 KM	1.500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan</i>				0 KM	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				0,4 KM	400.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				0,5 KM	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan								
			<i>Panjang Jembatan yang Direhabilitasi</i>				25 Meter	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan								
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				0,4 KM	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan								
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				10 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan								
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				35 Meter	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	350.000.000,00		
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1	1	1	1	350.000.000,00	-	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	150.000.000,00		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	100.000.000,00		
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>				70 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-	-
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				1 Badan Usaha	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-			-	2.900.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	2.300.000.000,00		
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang								
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang								
			<i>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</i>				1 Publikasi	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota								
			<i>dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota								
			0				2 0	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	600.000.000,00		
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar								
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>				1 Peta	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang								
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota								
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALUMUM (D
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang								
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				0 Kegiatan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALUMUM (D
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00		
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang								
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALUMUM (D
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				0 Layanan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang								
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				0 Sistem Informasi	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00		
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang								
			<i>Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang</i>				0 Kasus	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang]	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100	100	100	100	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
		-	-	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	-
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang								
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				0 Kasus	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR								
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				0 Kasus	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK								
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan								
			<i>Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat								
			<i>Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR								
			<i>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang								
			<i>Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang</i>				0 Berita Acara	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALLOKASI UMUM (DANALUM)
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCO ME / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadil anDan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0 Berita Acara	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadil anDan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							39.970.071.338,00							39.871.272.192,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 yaitu: **“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKENLAJUTAN”** maupun untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan sebagai instrument pelaksanaan dan program perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan pada lampiran di atas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2025 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan arah kebijakan tahun 2026 dalam RPJMD adalah Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2027. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah.

Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2027, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan

adanya penyempurnaan. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2027 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2026

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI